BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung, maka peneliti mengemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses komunikasi yang berlangsung dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung, antara lain melalui transformasi atau penyampaian informasi. Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam meningkatkan PAD melalui Simpatda dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, dimana dalam iplementasi kebijakan Simpatda sangat membantu aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam mengolah informasi dasar PAD menjadi bentuk-bentuk peralatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaalian pemungutan PAD sehingga terealisasinya peningkatan PAD Kota Bandung. Terutama dalam hal komunikasi Simpatda merupakan alat yang dapat mempermudah komunikasi antara sub-sub bagian dalam mengelola pendapatan daerah, dimana bila dibandingkan dengan proses komunikasi sebelum pelaksanaan kebijakan Simpatda, yang lebih dikenal dengan nama Manual Pendapatan Daerah (Mapatda). Kejelasan informasi

dalam implementasi kebijakan Simpatda, cukup jelas, dapat dimengerti, dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan. Konsistensi, Kebijakan yang dibuat oleh Dispenda Kota Bandung sudah konsisten dan tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

2. Sumber daya yang dapat menentukan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, antara lain *pertama* sumber daya manusia, sumber daya manusia aparatur Dispenda Kota Bandung dalam implementasi kebijakan Simpatda dapat dikatakan sudah cukup baik, dimana sebagian besar aparatur Dispenda Kota Bandung telah dapat menguasai aplikasi dan komputer yang menunjang keberhasilan dari implementasi Simpatda. *Kedua* sumber daya anggaran, sumberdaya anggaran yang tersedia dalam implementasi kebijakan Simpatda pada Dispenda Kota Bandung sudah mencukupi, dimana sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan Simpatda pada Dispenda Kota Bandung telah mendukung keberhasilan dari implementasi kebijakan Simpatda, terutama dalam melengkapi sarana dan prasarana Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang mendukung keberhasilan dari implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah. *Ketiga* sumber daya peralatan, Sumber daya peralatan dalam implementasi kebijakan Simpatda sudah memadai, dimana telah tersedianya sarana dan peralatan Simpatda yang mendukung keberhasilan dari implementasi kebijakan Simpatda pada kantor Dispenda Kota Bandung.. Sumber daya informasi dan kewenangan dalam implementasi kebijakan

Simpatda pada Dispenda Kota Bandung sudah jelas, dimana informasi dan kewenangan yang disampaikan sudah cukup jelas dan akurat serta telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Disposisi atau sikap pelaksana implementasi kebijakan Simpatda pada Dispenda Kota Bandung telah melaksanakan kebijakan dengan baik, dimana dapat dilihat dari: pemahaman dan pendalaman aparatur Dispenda Kota Bandung yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan Simpatda dalam mengelola pendapatan daerah, serta watak atau karakteristik dari para aparatur yang jujur dan demokratik dalam melaksanakan kebijakan Simpatda dengan tujuan meningkatkan PAD Kota Bandung.
4. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Simpatda pada Dispenda Kota Bandung sudah berjalan dan terstruktur dengan baik, dimana fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab serta pelaksanaan tugas dalam implementasi kebijakan Simpatda terjadi dan telah sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam meningkatkan PAD Kota Bandung. *Proses Standard Operating Prosedure* (SOP) merupakan pedoman yang digunakan aparatur Dispenda Kota Bandung dalam bertindak atau menjalankan tugasnya untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dalam menunjang terlaksananya implementasi kebijakan Simpatda.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti kemukakan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya di dalam proses komunikasi antara aparatur dengan aparatur maupun aparatur dengan masyarakat, dimana dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan Simpatda pada Dispenda Kota Bandung. Seorang pakar dari *World Bank* berpendapat bahwa batas minim dari PAD adalah 20%, bila mana PAD kurang dari 20% maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri atau kehilangan status otonomnya, untuk itu sebagai rekomendasi pada Dispenda Kota Bandung selaku badan yang berwenang mengelola pendapatan daerah agar lebih meningkatakan lagi kinerjanya dalam proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Simpatda, agar mengurangi kesalahan-kesalahan dalam penyampaian informasi pengelolaan pendapatan daerah yang mungkin terjadi.

2. Sumber daya yang melingkupi sumberdaya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, serta sumber daya informasi dan kewenangan dalam implementasi kebijakan Simpatda pada Dispenda Kota Bandung harus dilaksanakan secara maksimal, karena sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, serta sumber daya informasi dan kewenangan merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi terlaksananya implementasi kebijakan Simpatda dalam meningkatkan PAD Kota Bandung.
3. Disposisi atau sikap para pelaksana dari implementasi kebijakan Simpatda pada Dispenda Kota Bandung harus lebih diperbaiki, pemahaman dan pendalaman terhadap intensitas aparatur yang tinggi harus lebih ditingkatkan lagi agar terbentuk watak atau karakteristik dari para aparatur yang jujur dan demokratik yang menunjang terlaksananya keberhasilan dari implementasi kebijakan Simpatda pada Dispenda Kota Bandung dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan PAD Kota Bandung.
4. Struktur Birokrasi yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung harus lebih ditingkatkan, agar dalam melaksanakan pekerjaan tidak terjadi struktur birokrasi yang menyimpang dari tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya masing-masing. Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab dan pelaksanaan tugas dalam implementasi kebijakan Simpatda juga harus lebih ditingkatkan lagi terutama proses *Standars Operating Prosedure* (SOP), agar terwujudnya implementasi kebijakan Simpatda pada Dispenda Kota Bandung yang efektif dan efisien dalam pengelolaan pendapatan daerah.